

**Dampak Konflik PT. Freeport Indonesia Dengan Pemerintahan
Indonesia Terhadap Kepentingan Masyarakat Papua di Era
Pemerintahan Presiden Joko Widodo**

ABSTRAK

PT. Freeport Indonesia merupakan perusahaan pertambangan yang beroperasi di Papua, Indonesia sejak 1967 dan berafiliasi dengan Freeport Mc MoRan Copper & Gold Inc. Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 sebagai kebijakan baru pemerintahan tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, mengharuskan perusahaan pertambangan ini melakukan perubahan status Kontrak Kerja (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini kemudian menimbulkan konflik vertikal antara Pemerintahan Indonesia dengan pihak PT. Freeport Indonesia yang erat kaitannya dengan kepentingan Masyarakat Papua sebagai pemilik hak ulayat area beroperasinya perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan konflik tersebut terhadap masyarakat Papua tersebut di era pemerintahan presiden Joko Widodo. Dampak Konflik tersebut diteliti dan dianalisa merujuk pada teori Konflik dan teori Ketergantungan oleh Raymond Duvall dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan akhir sebagai upaya penyelesaian konflik antara kedua pihak menghasilkan dampak ekonomi dan dampak ketenagakerjaan bagi masyarakat Papua bagi sinergitas pembangunan Papua.

Kata Kunci : PT. Freeport Indonesia, Pemerintah Indonesia, Masyarakat Adat Papua.

***The Impact of Conflict Between PT. Freeport Indonesia With
Indonesian Government Towards The Interest of Papuan
Communities In The Era of President Joko Widodo's Government***

ABSTRACT

PT. Freeport Indonesia is a mining company operating in Papua, Indonesia since 1967 and affiliated by Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. Since the issuance of Government Policy regarding the implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities, this mining company requires changes in the status of the Work Contract (KK) to a special Mining Business License (IUPK). These then raises a vertical conflict between Indonesian Government with PT. Freeport Indonesia which is closely related the interest of Papuan Communities as the owner of customary rights in the area of operation of the company. This research aims to determine the conflict impacts on Papuan Communities in the era of President Joko Widodo's government. The impact of conflict was examined and analyzed referring to conflict theory and dependency theory bu Raymond Duvall using qualitative research methods. The results of this study is that the final decision as an effort to resolve the conflict between two parties produced economy impact's and employment impact's for the Papuan Communities for the synergy of development in Papua.

Key Words : *PT. Freeport Indonesia, Indonesia Government, Papuan Communities.*